

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi dan pangan merupakan kebutuhan manusia yang dianggap strategis dan sering mencakup hal-hal yang bersifat emosional bahkan politis. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat penting bagi landasan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam jangka panjang.

Pangan pokok umumnya banyak mengandung karbohidrat sehingga berfungsi sebagai sumber kalori utama. Di Indonesia, diantara bahan pangan berkarbohidrat, yaitu padi-padian, umbi-umbian dan batang palma, beras merupakan sumber kalori terpenting bagi sebagian besar penduduk. Beras diperkirakan menyumbang kalori sebesar 60-80 persen dan protein 45-55 persen bagi rata-rata penduduk.

Namun kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia yang masih kekurangan pangan dan jutaan orang meninggal setiap tahunnya akibat malnutrisi dan kelaparan serta lebih banyak lagi yang berjuang mengalahkan kelaparan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Secara detail, lebih dari 800 juta orang menderita kekurangan pangan yang mereka perlukan

untuk kebutuhan hidup sehat dan produktif, 24.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan (IFRI, 2001; Chavas, 2000) dalam (Fatah, 2006: 123). Data ini menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan serius di dunia. Sementara itu di Indonesia tahun 1998 jumlah total penduduk yang berada dalam kondisi rawan pangan adalah 32 juta jiwa, yaitu lebih dari 1/6 total penduduk Indonesia (Lihat: Fatah, 2006: 173).

Bila dicermati persoalan ketahanan pangan ini tak lepas dari kondisi perekonomian di suatu negara. Karena secara logis, seseorang yang hidupnya sudah sejahtera atau mapan perekonomiannya tentu dapat mengatasi permasalahan kebutuhan pangan dalam kebutuhannya. Maka untuk itu tidaklah mengherankan apabila masalah ketahanan pangan ini sering muncul di negara-negara miskin berkembang.

Masalah-masalah kelaparan dan malnutrisi (kekurangan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan) tentu saja tak lepas kaitannya dengan masalah kemiskinan. Nielson (2001) dalam (Fatah, 2006: 175) berpendapat bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan implementasi (tindakan terhadap suatu rencana) strategi yang kokoh dalam dan berkelanjutan ke arah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, ekonomi harus diantarkan melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Masyarakat miskin hendaknya dilibatkan dalam proses pertumbuhan, antara lain dengan cara pengembangan pasar, institusi dan infrastruktur yang dapat diakses oleh

mereka. Dengan keterbatasan ekonomi, masyarakat marginal merupakan akar masalah atau faktor utama terjadinya kelaparan dan malnutrisi. Ketidak mampuan finansial inilah yang menyebabkan si miskin tidak mampu membeli beras dan kebutuhan makanan pokok lainnya sebagai prasyarat keberlanjutan hidupnya.

Berdasarkan hal itulah pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pangan bagi penduduk miskin melalui Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin). Program raskin adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga miskin (Juklak Raskin, 2003:). Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan salah satu bagian dari program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKS-BBM). Tujuan utama dicanangkannya program tersebut adalah sebagai upaya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pangan, khususnya bagi penduduk miskin, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Harapan dari implementasi program ini adalah agar penduduk miskin tidak mengalami kekurangan pangan, dengan demikian kesejahteraan mereka pun akan sedikit terjamin. Melihat pada aspek yang lebih kecil, Kota Pontianak pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebesar 587.169 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 5.56% atau sebesar 32.800 jiwa. Berikut data penduduk menurut Kecamatan di Kota Pontianak tahun 2013.

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RTS
1	Pontianak Selatan	86.601	652
2	Pontianak Tenggara	47.474	632
3	Pontianak Timur	87.199	3.852
4	Pontianak Barat	130.202	4.161
5	Pontianak Kota	116.543	1.725
6	Pontianak Utara	119.150	3.987
	Kota Pontianak	587.169	15.009

sumber/source : BPS Kota Pontianak Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pontianak Barat yaitu sebesar 130.202 jiwa dengan jumlah RTS sebanyak 4.161. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sebesar 47.474 jiwa dengan jumlah RTS sebesar 632. Oleh karena itu penelitian dilakukan di Kecamatan Pontianak Barat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

Jumlah penduduk terbanyak berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin yang menerima manfaat Raskin. Program Raskin sebagai program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Pemerintah memberikan bantuan subsidi beras tidak hanya terhadap masyarakat yang sangat miskin

dan miskin, akan tetapi juga masyarakat yang hampir miskin. Jika rata-rata konsumsi beras saat ini 180 kg/kapita/tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas 4 (empat) jiwa, maka Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,6% dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS. Berikut adalah data dari jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima Raskin di Kecamatan Pontianak Barat berdasarkan Kelurahan.

TABEL 1.2
JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH RTS DI
KECAMATAN
PONTIANAK BARAT
BERDASARKAN KELURAHAN TAHUN 2013

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RTS
1	Pal Lima	11.739	301
2	Sungai Jawi Dalam	31.235	713
3	Sungai Jawi Luar	37.555	1.347
4	Sungai Beliung	49.673	2.115
Total		130.202	4.476

sumber/source : BPS Kota Pontianak Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat pada kelurahan Sungai Beliung yaitu sebesar 49.673 jiwa dengan jumlah RTS penerima Raskin sebanyak 2.115 kepala keluarga. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada kelurahan Pal Lima yaitu sebesar 11.739 jiwa dengan jumlah RTS penerima Raskin sebanyak 301 kepala keluarga. Berikut data RTS-PM dan pagu Raskin tahun 2013 di Kelurahan Sungai Beliung.

TABEL 1.3
JUMLAH RTS DAN ALOKASI PAGU RASKIN
DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT TAHUN 2013

NO	KELURAHAN	JUMLAH RTS	JUMLAH ALOKASI PAGU RASKIN (15KG)	
			KG/BULAN	KG/TAHUN
1	Pal Lima	301	4.515	54.180
2	Sungai Jawi Dalam	713	10.695	128.340
3	Sungai Jawi Luar	1.347	20.205	242.460
4	Sungai Beliang	2.115	31.725	380.700
Total		4.476	67.140	805.680

sumber/source : Data Olahan Perum BULOG Kalbar

Berdasarkan data tabel 3 maka dapat dilihat bahwa Kecamatan Pontianak Barat memiliki 4 (empat) kelurahan yang memiliki jumlah keseluruhan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar 4.476 kk yang tersebar dimasing-masing kelurahan, dengan alokasi pagu Raskin 15 Kg/kk/bulan. Untuk Kecamatan Pontianak Barat sendiri menerima jumlah pagu raskin 67.140 kg untuk setiap bulannya dan 805.680 kg setiap tahunnya dalam 12 kali penyaluran Raskin. Bila dilihat dari data kelurahan yang memiliki jumlah RTS terbesar adalah Kelurahan Sungai Beliang dengan jumlah RTS sebesar 2.115 kk, sehingga dalam satu bulan Kelurahan Sungai Beliang memperoleh Pagu Raskin sebesar 31.725 kg dan 380.700 kg untuk setiap tahunnya.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kelurahan Sungai Beliang dikarenakan memiliki jumlah RTS terbesar untuk

Kecamatan Pontianak Barat. Kondisi kemiskinan di Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sungai Beliang dapat dilihat dari salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencarian yang tidak menentu sehingga masalah tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan, maka permasalahan sosial sebagai dampak kemiskinan juga bertambah, seperti: masalah lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, pendapatan perkapita, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji Program Raskin melalui pendekatan **PERAN KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG**. Dengan harapan dapat memaparkan hasil telaah dan dapat diambil sebagai pemecahan masalah.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kebijakan subsidi beras terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang.
2. Bagaimana peran kebijakan harga Raskin terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang.
3. Bagaimana peran jumlah tanggungan keluarga terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang .

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran kebijakan subsidi beras terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang.
2. Untuk mengetahui peran kebijakan harga Raskin terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang.
3. Untuk mengetahui peran jumlah tanggungan keluarga terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program srata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Sedangkan secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan iolmmu pengetahuan

Ekonomi khususnya mengenai peran Raskin terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Beliang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, sebagai acuan dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi atau menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada.

Universitas Tanjungpura